

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Skripsi ini berusaha membahas bagaimana strategi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau yang dikenal dengan ESG yang dikembangkan Indonesia pasca presidensi G20 tahun 2022 mampu memengaruhi keputusan investasi Jepang di Indonesia. ESG, yang awalnya muncul sebagai konsep normatif dalam tata kelola perusahaan, kini telah menjelma menjadi faktor penentu dalam arus modal global yang mengubah paradigma investasi internasional (Krosinsky & Purdom, 2016). Fenomena pengarus utamaan risiko ESG ini didukung oleh argumen Eccles (2022) yang menyatakan bahwa kegagalan korporasi dalam mengadopsi transparansi non-keuangan di era modern secara linear akan menurunkan valuasi pasar dan mengusir investor institusional makro (Eccles, 2022, h. 45). Pola ini terlihat jelas di kawasan regional Asia, di mana Volz (2020) menegaskan bahwa emerging markets di Asia Tenggara tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda regulasi hijau jika ingin tetap kompetitif dalam memperebutkan alokasi modal dari negara-negara maju yang portofolionya telah terikat ketat pada mandat dekarbonisasi (Volz, 2020, h. 112).

Pergeseran paradigma ini menempatkan ESG tidak hanya sebagai komitmen moral semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam diplomasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang semakin relevan dalam hubungan ekonomi bilateral. Dalam konteks hubungan Indonesia–Jepang, peran ESG semakin relevan

karena kedua negara berada pada fase penting transisi menuju ekonomi rendah karbon dan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, sejalan dengan komitmen global terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (UNDP, 2024).

Sejak tahun 1970, Jepang telah menjadi salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia dalam berbagai sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi nasional (Hill, 2000). Hubungan investasi yang panjang ini menghasilkan kontribusi signifikan terhadap industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa pada tahun 2023, realisasi investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) mencapai Rp.744 triliun, dengan Jepang menempati posisi keempat sebagai negara investor terbesar senilai USD 4,63 miliar yang menegaskan konsistensi peran Jepang dalam struktur investasi Indonesia (BKPM, 2023). Angka tersebut menegaskan keberlanjutan peran Jepang dalam struktur investasi Indonesia, sekaligus menjadi alasan mengapa kebijakan ESG nasional pasca G20 relevan diteliti dari perspektif daya tarik investasi Jepang, terkhususnya dalam konteks pergeseran global menuju investasi berkelanjutan yang semakin mendominasi preferensi investor negara maju.

Sektor otomotif merupakan contoh nyata bagaimana pola investasi Jepang terikat pada dinamika kebijakan ESG yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dan menjadi indikator respons investor terhadap komitmen keberlanjutan. Toyota *Motor Corporation*, yang telah lama menjadikan Indonesia sebagai basis produksi

regional untuk pasar Asia Tenggara, pada tahun 2022 mengumumkan investasi senilai USD 1,8 miliar untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia hingga 2026 sebagai bagian dari strategi elektrifikasi global perusahaan (Toyota Corporation, 2022).

Keputusan ini sejalan dengan tren global menuju elektrifikasi transportasi dan target emisi rendah Jepang tahun 2050 yang dideklarasikan oleh pemerintah Jepang sebagai komitmen terhadap netralitas karbon. Namun, realisasi investasi ini memerlukan ekosistem yang mendukung mulai dari ketersediaan energi bersih, regulasi lingkungan yang jelas, hingga infrastruktur rantai pasok baterai yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ESG Indonesia seperti taksonomi hijau dan kerangka pembiayaan berkelanjutan menjadi penentu dalam keberhasilan transformasi industri otomotif berbasis investasi Jepang yang tidak hanya bergantung pada insentif fiskal namun juga kepastian regulasi keberlanjutan.

Tidak hanya otomotif, sektor energi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara kebijakan ESG dan minat investor Jepang yang semakin selektif dalam mengalokasikan modal untuk proyek-proyek infrastruktur energi. Selama beberapa dekade, Jepang banyak berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik dan infrastruktur energi fosil di Indonesia sebagai bagian dari kerja sama ekonomi bilateral yang telah terjalin sejak era 1970 an. Namun, arah kebijakan Jepang kini berubah seiring dengan deklarasi *Net Zero Emission* 2050 yang mengharuskan reorientasi portofolio investasi dari energi fosil menuju energi terbarukan.

*Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) pada 2023 memperbarui kebijakan pembiayaannya dengan menekankan standar ESG sebagai syarat

dukungan proyek, yang secara signifikan mengubah kriteria kelayakan proyek yang dapat dibiayai oleh lembaga pembiayaan Jepang (JBIC, 2023). Proyek energi yang tidak sejalan dengan mitigasi emisi atau berpotensi menciptakan risiko sosial besar semakin sulit mendapat pembiayaan dari lembaga Jepang, yang menunjukkan bahwa *screening* ESG telah menjadi bagian integral dari proses *due diligence* investor. Hal ini membuat implementasi ESG di Indonesia menjadi penentu apakah proyek energi baru, terutama di bidang terbarukan, dapat menarik modal Jepang yang semakin terkonsentrasi pada investasi berkelanjutan.

Latar belakang kebijakan Indonesia pasca G20 menunjukkan transformasi signifikan dalam kerangka regulasi keberlanjutan yang menandai pergeseran dari komitmen normatif menuju implementasi operasional. Pada 2022, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0, yang mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berdasarkan tingkat keberlanjutan dan memberikan panduan bagi pelaku pasar keuangan dalam menyalurkan pembiayaan hijau (OJK, 2022). Taksonomi ini diharapkan menjadi rujukan bagi perbankan, investor, dan perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih selektif sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan secara nasional.

Kementerian Keuangan meluncurkan *ESG Framework and Manual for Infrastructure Projects* sebagai panduan teknis dalam menilai risiko ESG proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Kemenkeu, 2022). Inisiatif-inisiatif tersebut menandai pergeseran penting dari sekadar komitmen normatif menjadi kebijakan operasional yang dapat dipantau dan dievaluasi, suatu langkah yang memberi kepastian regulasi bagi investor asing termasuk Jepang yang

memerlukan *predictability* dalam lingkungan investasi untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang inheren dalam investasi jangka panjang.

Tren ESG di Asia semakin kuat dengan investor asing menuntut kepastian regulasi dan praktik yang kredibel dari negara tujuan investasi sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan alokasi modal. Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan PDB nominal mencapai USD 1,3 triliun, menghadapi tekanan untuk memastikan bahwa kerangka ESG tidak hanya dideklarasikan tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Dalam hal ini, keberhasilan Indonesia dalam memperlihatkan kredibilitas kebijakan ESG pasca G20 akan mempengaruhi persepsi Jepang mengenai kelayakan jangka panjang investasi di Indonesia yang tidak hanya bergantung pada *fundamentals* ekonomi namun juga pada kualitas institusi dan *governance*.

ESG menjadi semacam sinyal institusional yang menurunkan risiko ketidakpastian dan meningkatkan daya tarik pasar domestik bagi investor yang mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam strategi investasi mereka (UNDP, 2024). Sinyal institusional ini penting karena dalam Teori Liberalisme Institusional Robert Keohane (1984), institusi berperan mengurangi asimetri informasi dan menciptakan ekspektasi stabil yang memfasilitasi kerja sama ekonomi internasional (Keohane 1984, h. 85). Tantangan implementasi tidak dapat diabaikan dalam menganalisis efektivitas kebijakan ESG Indonesia sebagai daya tarik investasi yang kredibel dan *sustainable*. *Clean Energy Finance and Investment Policy Review of Indonesia* yang diterbitkan oleh OECD mencatat bahwa meskipun

Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan dengan kapasitas panas bumi terbesar di dunia dan potensi tenaga surya yang melimpah, hambatan regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan insentif fiskal menjadi kendala utama dalam mobilisasi investasi hijau (OECD, 2021).

Kondisi ini menciptakan *gap* antara narasi kebijakan ESG dengan realitas implementasi yang sering kali tertinggal dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional. Investor Jepang, yang terbiasa dengan ekosistem regulasi yang konsisten dan transparan di negara asal mereka, akan menjadikan *gap* ini sebagai faktor penting dalam menilai risiko investasi dan menentukan apakah akan mengalokasikan modal dalam skala besar atau mengadopsi strategi *wait and see*. Dengan demikian, ESG di Indonesia pasca G20 tidak hanya dipandang dari sisi deklarasi atau dokumen kebijakan semata, tetapi juga dari kualitas implementasi yang menentukan apakah ia berfungsi sebagai daya tarik atau justru menjadi hambatan bagi masuknya investasi berkelanjutan.

Analisis FDI di Indonesia yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti lebih sering menyoroti faktor tradisional seperti insentif fiskal, upah tenaga kerja, dan stabilitas politik sebagai determinan utama masuknya modal asing, sementara aspek ESG relatif kurang diperhatikan dalam literatur akademik (Hill, 2000, h. 245). Berbeda dengan temuan penelitian di negara-negara Asia lainnya yang menunjukkan pengaruh positif skor ESG terhadap aliran FDI terutama dari negara-negara maju seperti Jepang yang memiliki standar keberlanjutan tinggi dalam kebijakan investasi luar negerinya. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks Indonesia, fokus pada ESG sebagai daya tarik investasi Jepang masih

relatif baru dan belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam studi empiris, sehingga penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi hubungan yang belum banyak dikaji dalam literatur akademik dan mengisi gap pengetahuan mengenai peran ESG dalam keputusan investasi bilateral Indonesia-Jepang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap momentum spesifik pasca KTT G20 Bali 2022 sebagai *turning point* dalam evolusi kebijakan ESG Indonesia yang memberikan konteks institusional baru bagi interaksi ekonomi kedua negara.

Momentum G20 2022 memberikan konteks baru bagi Indonesia dalam memproyeksikan komitmen keberlanjutan kepada komunitas internasional dan memperkuat posisi tawarnya dalam menarik investasi hijau. Sebagai tuan rumah, Indonesia tidak hanya memperlihatkan kepemimpinan diplomatik dalam forum multilateral, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif konkret yang diluncurkan sebelum dan selama presidensi G20. Presidensi G20 Bali 2022 sukses bertindak sebagai global steering mechanism yang menjembatani norma arsitektur keuangan hijau internasional ke dalam kebijakan domestik negara berkembang secara mengikat (Kirton & Larionova 2023, h. 78). Penguatan tata kelola ekonomi global pasca-pandemi melalui G20 ini, menuntut pergeseran radikal dari model finansial tradisional menuju konsep investasi yang meletakkan penciptaan nilai sosial-lingkungan pada bobot risiko yang sama tinggi dengan keuntungan komersial (Schoenmaker & Schramade, 2019, h. 142).

Peluncuran kebijakan taksonomi hijau dan pedoman infrastruktur berbasis ESG menunjukkan bahwa agenda global diterjemahkan ke dalam kebijakan

domestik yang operasional dan dapat diimplementasikan oleh pelaku pasar. Dari perspektif Jepang, momentum ini sangat penting karena memberi sinyal bahwa Indonesia berupaya mengintegrasikan standar keberlanjutan internasional ke dalam pembangunan nasional dan tidak sekadar mengadopsi retorika hijau tanpa tindakan konkret. Kejelasan sinyal ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan regional merebut *green* FDI yang semakin kompetitif di antara negara-negara ASEAN yang sama-sama berlomba menarik investasi berkelanjutan dari negara-negara maju.

Berbagai pernyataan dan keputusan investasi menunjukkan respons positif Jepang terhadap penguatan ESG di Indonesia yang mencerminkan perubahan preferensi investor dalam mengalokasikan modal ke *emerging markets*. Dalam laporan tahun 2023, *Japan External Trade Organization* menyatakan bahwa perusahaan Jepang semakin memperhatikan peraturan lingkungan dan sosial di negara tujuan investasi sebagai bagian dari *risk management* dan *corporate social responsibility* mereka (JETRO, 2023). Perusahaan otomotif seperti Mitsubishi Motors telah menyatakan bahwa mereka hanya akan meningkatkan produksi kendaraan listrik di Indonesia jika rantai pasokan bahan baku khususnya nikel untuk baterai memenuhi standar keberlanjutan internasional yang mencakup aspek lingkungan dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ESG Indonesia tidak hanya relevan sebagai standar normatif, tetapi juga berkontribusi langsung pada keputusan strategis perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia dalam menentukan skala dan *timing* investasi mereka. Pernyataan-pernyataan semacam ini mengindikasikan bahwa *screening* ESG telah menjadi bagian integral

dari proses evaluasi investasi perusahaan Jepang dan bukan lagi sekadar pertimbangan tambahan yang peripheral.

Karakteristik kehati-hatian pemodal Jepang dalam kalkulasi ESG global menggarisbawahi bahwa korporasi asal Jepang menempatkan pilar *governance* dan mitigasi eksternalitas lingkungan sebagai proksi utama untuk mengukur *long-term corporate survival* (Schoenmaker, 2021, h. 89). Hal ini didukung oleh argumen Weber & Feltmate (2022) bahwa lembaga pembiayaan publik maupun swasta di negara maju telah mengadopsi standar akuntabilitas yang mewajibkan bukti empiris bebas *greenwashing* di negara tujuan investasi sebelum dana pinjaman atau ekuitas asing dapat dicairkan secara legal (Weber & Feltmate, 2022, h. 203).

Pada titik yang sama, lembaga pembiayaan Jepang juga mengambil sikap yang konsisten dengan tren global menuju pembiayaan berkelanjutan yang semakin mendominasi kebijakan *development finance institutions*. JBIC dan JICA sekarang menerapkan skema pembiayaan yang menuntut kepatuhan ESG dalam proyek infrastruktur dan energi sebagai syarat *eligibility* untuk mendapatkan dukungan finansial (JBIC, 2023). Mereka mendukung proyek energi terbarukan di Indonesia seperti pembangunan pembangkit tenaga surya dan pembiayaan untuk transportasi rendah emisi sambil memeriksa secara menyeluruh aspek sosial dan tata kelola untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi dalam implementasi proyek.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa proyek di Indonesia yang tidak dapat menunjukkan kesesuaian dengan prinsip ESG menghadapi hambatan akses pendanaan Jepang meskipun proyek tersebut menghasilkan keuntungan finansial

yang menarik secara komersial. Konteks ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan ESG domestik dapat menjadi alat strategis untuk mengarahkan investasi Jepang ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia dan sejalan dengan target *net zero emissions* yang telah ditetapkan dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution*.

Dalam lingkup regional, Indonesia berhadapan dengan kompetisi yang semakin ketat untuk menarik *green FDI* di antara negara-negara ASEAN yang sama-sama berupaya memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai global industri hijau. Vietnam misalnya berhasil mencatat lonjakan investasi di sektor energi terbarukan melalui kebijakan tarif *feed in* yang jelas dan atraktif, meskipun menghadapi tantangan dalam infrastruktur jaringan listrik yang belum mampu mengakomodasi kapasitas pembangkit terbarukan yang terus bertambah. Thailand pada 2022 juga meluncurkan *Thailand Green Taxonomy* yang memberi kepastian klasifikasi aktivitas berkelanjutan sejalan dengan strategi mereka untuk menjadi pusat produksi kendaraan listrik di Asia Tenggara yang didukung oleh ekosistem industri otomotif yang sudah matang (BOT, 2022).

Malaysia memperkenalkan instrumen *Sustainable and Responsible Investment* yakni *Green Sukuk* yang berhasil menarik minat investor dari Timur Tengah dan Asia Timur yang mencari instrumen keuangan syariah berbasis keberlanjutan. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah dan pasar yang lebih besar, namun kualitas regulasi dan konsistensi implementasi kebijakan ESG masih menjadi titik lemah yang sering dikritik oleh investor dan lembaga rating internasional. Hal ini

menegaskan bahwa daya tarik Indonesia di mata Jepang akan sangat bergantung pada kemampuan negara ini mempersempit kesenjangan antara kebijakan yang dideklarasikan dengan praktik implementasi di lapangan yang sering kali mengalami hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga.

Tantangan implementasi ESG di Indonesia tidak hanya berasal dari aspek teknis seperti keterbatasan teknologi atau infrastruktur, tetapi juga dari dimensi politik dan institusional yang sering kali menjadi *bottleneck* dalam realisasi proyek berkelanjutan. OECD dalam laporannya menekankan adanya tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga yang sering memperlambat realisasi proyek berkelanjutan karena tidak ada koordinasi yang efektif dan sinkronisasi kebijakan antar sektor (OECD, 2021). Misalnya, perbedaan prioritas antara kementerian energi yang fokus pada keamanan pasokan energi dengan kementerian keuangan yang menekankan efisiensi fiskal dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor mengenai arah kebijakan jangka panjang.

Kasus revisi taksonomi hijau Indonesia yang sempat memasukkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara transisi ke dalam kategori hijau memunculkan perdebatan internasional dan kritik tajam dari investor dan lembaga lingkungan yang khawatir akan risiko *greenwashing*. Perdebatan ini memberi sinyal bahwa meskipun kerangka ESG telah ada dan didokumentasikan dengan baik, kredibilitas implementasi dan konsistensi definisi menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak justru mengurangi daya tarik Indonesia dan merusak reputasi sebagai destinasi investasi hijau yang kredibel.

Di Indonesia, kualitas pelaporan ESG juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat perusahaan yang belum sepenuhnya memahami standar internasional dalam *sustainability reporting*. Sejak tahun 2019, OJK mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan yang diberikan kepada publik dan pihak regulator (OJK, 2022). Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas laporan masih sangat beragam dengan banyak perusahaan hanya memenuhi kewajiban formal tanpa memberikan data substantif yang dapat diverifikasi oleh *stakeholder* eksternal. Investor Jepang yang terbiasa dengan standar pelaporan berkelanjutan Tokyo *Stock Exchange* yang ketat dan komprehensif akan memandang perbedaan kualitas ini sebagai indikator kesiapan pasar dan kemampuan perusahaan Indonesia dalam mengelola risiko ESG secara profesional. Berangkat dari kondisi tersebut, peningkatan kualitas pelaporan ESG dari perusahaan Indonesia akan menjadi komponen penting dalam meningkatkan daya tarik modal Jepang yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keberlanjutan perusahaan yang menjadi target investasi mereka.

Literatur akademik yang ditulis tentang investasi asing di Indonesia memberikan landasan teoretis untuk memahami dinamika yang mempengaruhi keputusan investor namun belum banyak mengeksplorasi dimensi ESG secara mendalam. Menurut buku *The Indonesian Economy*, Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didorong oleh investasi asing selama beberapa dekade terakhir dengan kontribusi signifikan terhadap transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi (Hill, 2000, h. 230). Namun, elemen non ekonomi seperti tata kelola

institusi mulai memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang investasi tersebut. Seringkali, stabilitas kebijakan dan kualitas institusi politik ekonomi lebih penting daripada insentif fiskal semata dalam menarik investor jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka ESG dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika institusional yang mempengaruhi preferensi investor khususnya dari negara maju seperti Jepang yang memiliki standar tata kelola tinggi dan ekspektasi yang jelas terhadap transparansi dan akuntabilitas di negara tujuan investasi mereka.

Hubungan antara institusi dan perilaku investor juga dapat dijelaskan melalui Teori Liberalisme Institusional Robert Keohane (1984) yang menjadi kerangka teoretis utama dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana norma dan institusi internasional membentuk kerja sama ekonomi bilateral. Dalam buku *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Robert Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan menciptakan ekspektasi stabil di antara aktor rasional dalam sistem internasional yang anarki (Keohane, 1984, h. 85).

Dalam konteks ini, ESG Indonesia pasca G20 dapat dilihat sebagai bentuk institusi domestik yang memperkuat kredibilitas Indonesia di mata Jepang dengan menyediakan kerangka regulasi yang *predictable* dan *transparent*. Pembentukan aturan main domestik ini mencerminkan dinamika yang dijelaskan oleh Keohane & Nye (2021) mengenai interdependensi kompleks, di mana saluran hubungan transnasional antar-negara tidak lagi murni bertumpu pada isu keamanan militer, melainkan diikat oleh rezim ekonomi dan lingkungan global yang saling

bergantung (Keohane & Nye, 2021, h. 64). Dalam perkembangan mutakhir Liberalisme Institusional, Fioretos (2017) mengargumenkan bahwa kredibilitas sebuah negara dalam negosiasi ekonomi internasional sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi domestik (*domestic institutional design*) yang memiliki kepatuhan formal terhadap norma-norma global yang sedang berlaku (Fioretos, 2017, h. 155).

ESG bukan sekadar dokumen kebijakan atau deklarasi normatif, tetapi institusi yang menyediakan informasi kredibel, mengatur perilaku pelaku ekonomi, dan menciptakan kepastian bagi pelaku investasi asing yang memerlukan *predictability* dalam lingkungan investasi untuk mengurangi risiko. Dengan demikian, keberhasilan implementasi ESG dapat menjadi mekanisme institusional yang menjembatani kepentingan ekonomi Indonesia dengan standar keberlanjutan yang diusung Jepang dalam kebijakan investasi luar negerinya, sekaligus menciptakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua negara dalam jangka panjang.

Konsep *Sustainable Investment* yang dikembangkan oleh Cary Krosinsky dan Sophie Purdom melengkapi kerangka teoretis dengan memberikan perspektif praktis mengenai bagaimana investor mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam keputusan alokasi modal mereka. Dalam bukunya *Sustainable Investing: Revolutions in Theory and Practice*, mereka berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran seminal dalam dunia investasi di mana pertimbangan finansial harus mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan untuk kesuksesan sosial yang

berkelanjutan, sementara isu keberlanjutan juga perlu didorong oleh *business case* yang kuat (Krosinsky & Purdom, 2016, h. 3).

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa investor kontemporer tidak lagi dapat mengabaikan eksternalitas lingkungan dan sosial sebagai variabel yang terpisah dari analisis investasi melainkan mengintegrasikannya sebagai faktor material yang mempengaruhi valuasi aset jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep *sustainable investment* berarti bahwa kebijakan ESG yang kredibel dan terukur dapat menjadi *competitive advantage* dalam menarik investor seperti Jepang yang telah mengadopsi prinsip-prinsip *sustainable investment* dalam strategi korporat dan kebijakan pembiayaan mereka.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menegaskan bahwa kebijakan ESG Indonesia pasca G20 harus dilihat sebagai komponen yang semakin penting dalam hubungan ekonomi internasional bukan sebagai instrumen tambahan yang peripheral atau opsional dalam strategi pembangunan nasional. Di satu sisi, ESG menawarkan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi Jepang terutama di sektor otomotif, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan yang menjadi prioritas dalam transformasi ekonomi menuju *net zero emissions*, tetapi di sisi lain, keterbatasan implementasi dan gap antara kebijakan dengan praktik dapat menghalangi minat investor dan merusak kredibilitas Indonesia sebagai destinasi investasi hijau. Fokus pada ESG sebagai daya tarik investasi Jepang masih relatif baru dalam konteks Indonesia dan belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik, tetapi persaingan regional yang semakin

ketat menekankan pentingnya kredibilitas kebijakan dan konsistensi implementasi sebagai faktor kunci dalam memenangkan kompetisi menarik *green* FDI.

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong penerapan prinsip ESG melalui berbagai kebijakan dan forum internasional, termasuk KTT G20 Bali 2022, implementasi strategi tersebut dalam menarik investasi Jepang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup konsistensi kebijakan, kesiapan institusi, serta efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang disampaikan di tingkat internasional dengan implementasi di tingkat nasional, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai strategi Indonesia dalam mendorong penerapan ESG sebagai daya tarik investasi Jepang di Indonesia.

Sangat penting untuk diingat bahwa sebagai konsekuensi langsung dari penerapan ESG semata, peningkatan investasi Jepang setelah G20 Bali 2022 tidak dapat diterima sepenuhnya. Faktor-faktor tambahan, seperti pergeseran rantai pasokan global setelah pandemi, depresiasi yen yang mendorong investasi luar negeri Jepang, insentif fiskal untuk kendaraan listrik yang diberikan pemerintah Indonesia sejak tahun 2023, dan kebijakan hilirisasi nikel yang memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia dalam ekosistem baterai global, semuanya berkontribusi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa ESG adalah satu-satunya faktor yang mendorong peningkatan investasi di Jepang; sebaliknya, itu melihat bagaimana penguatan kerangka ESG berfungsi sebagai salah satu sinyal institusional yang berkontribusi pada keputusan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara strategi kebijakan dan komitmen ESG pasca KTT G20 Bali 2022 dengan keputusan investasi Jepang di Indonesia, dengan menggunakan Teori Liberalisme Institusional dari Robert Keohane dan konsep *Sustainable Investment* dari Cary Krosinsky dan Sophie Purdom sebagai kerangka analisis untuk memahami mekanisme institusional yang menghubungkan kebijakan ESG dengan preferensi investor dalam konteks hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Jepang.

### 1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang ada, penelitian ini menciptakan rumusan permasalahan seperti berikut:

**“Bagaimana strategi kebijakan dan komitmen Indonesia dalam mendorong penerapan prinsip ESG sebagai daya tarik investasi Jepang pasca KTT G20 Bali 2022?”**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana strategi Indonesia dalam mendorong penerapan prinsip *Environmental, Social, Governance* (ESG) sebagai daya tarik investasi Jepang pasca KTT G20 Bali 2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana strategi kebijakan dan komitmen ESG Indonesia tidak hanya dipahami

sebagai agenda keberlanjutan, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat daya tarik investasi asing, khususnya Jepang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perluasan wacana hubungan internasional dan kebijakan ekonomi, serta membuka ruang pemahaman bahwa praktik ESG dapat berfungsi ganda: sebagai standar global sekaligus diplomasi ekonomi yang strategis.

#### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini untuk memajukan disiplin ilmu hubungan internasional secara akademis, terutama dalam hal memahami dinamika politik ekonomi global dari sudut pandang ESG. Penelitian ini memperluas pemahaman kita mengenai bagaimana aturan keberlanjutan dapat berfungsi ganda sebagai peraturan perundang-undangan domestik dan alat diplomasi ekonomi yang memengaruhi arus investasi asing langsung (FDI), dengan mengkaji inisiatif dan komitmen ESG Indonesia sebagai variabel analisis. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademis dalam memperluas diskursus tentang integrasi keberlanjutan, investasi, dan hubungan bilateral, terutama pada konteks interaksi Indonesia–Jepang pasca G20 Bali Summit 2022. Pada akhirnya, penelitian ini dapat membuka ruang bagi pengembangan kerangka teoritis maupun praktis yang relevan untuk penelitian lanjutan mengenai peran ESG dalam membentuk konfigurasi hubungan internasional di era kontemporer.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi pembuat kebijakan khususnya dalam konteks hubungan investasi antara Jepang dan Indonesia. Secara

praktis, penelitian ini dapat membantu Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat harmonisasi regulasi ESG antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi acuan akademis bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji manfaat perluasan kebijakan investasi hijau ini terhadap stabilitas ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Peneliti juga merekomendasikan bagi kajian masa depan untuk memperluas lokus penelitian pada sektor transisi energi terbarukan yang lebih spesifik, guna menguji efektivitas daya saing instrumen taksonomi hijau Indonesia jika dibandingkan dengan negara pesaing lainnya di Asia Tenggara dalam memperebutkan alokasi modal lestari dari Jepang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Setiap bab tersusun dari sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks strategis pasca G20 Bali *Summit* 2022, pertanyaan penelitian mengenai strategi kebijakan dan komitmen ESG Indonesia sebagai faktor daya tarik investasi Jepang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, serta kerangka pemikiran. Selain itu, bab ini dilengkapi dengan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab fokus kajian.

### **BAB III STRATEGI KEBIJAKAN DAN KOMITMEN INDONESIA PASCA KTT G20 BALI 2022 DALAM MENDORONG PENERAPAN PRINSIP ESG**

Bab ini membahas penguatan komitmen Indonesia terhadap ESG melalui Presidensi G20 Bali 2022, perkembangan regulasi ESG nasional, strategi pemerintah dalam mendorong implementasi ESG melalui penguatan tata kelola, pembiayaan berkelanjutan, dan transisi energi hijau, serta peluang, tantangan, dan relevansinya terhadap investasi Jepang.

### **BAB IV PRINSIP ESG SEBAGAI DAYA TARIK INVESTASI JEPANG DI INDONESIA PASCA KTT G20 BALI 2022**

Bab ini menganalisis ESG sebagai daya tarik investasi Jepang di Indonesia melalui dinamika investasi Jepang, karakteristik dan preferensi investor Jepang terhadap ESG, pengaruh kebijakan ESG terhadap keputusan investasi, respons investor Jepang pasca G20 Bali 2022, tantangan implementasi, serta proyeksi arus investasi Jepang di masa mendatang.

## **BAB V        PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh temuan penelitian mengenai efektivitas strategi ESG Indonesia dalam menarik investasi Jepang, serta saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan maupun penelitian selanjutnya.

